

**PERBANDINGAN MUTU PAUD YANG DIKELOLA DENGAN DIDANAI DANA
GAMPONG DAN YANG TIDAK DIDANAI OLEH DANA GAMPONG
DI KOTA BANDA ACEH**

Lina Amelia^{1*}, Aulia Afridzal², dan Hasdiana³
^{1,2,3}STKIP Bina Bangsa Getsempena

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran mutu PAUD yang dikelola dengan didanai dana gampong dengan yang tidak didanai oleh dana gampong di kota banda aceh. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Sampel penelitiannya ada 2 sekolah yaitu PAUD Sejahtera (didanai dana gampong) dan TK Aisiyyah (tidak didanai dana gampong). Wawancara dilakukan oleh peneliti antara lain kepada: (1) kepala sekolah PAUD desa dan kepala sekolah PAUD mandiri, (2) guru, (3) perangkat desa (kepala desa) (4) Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa semua kabupaten/ kota menerima dana yang ber sumber dari APBN yang digunakan untuk pengembangan penyelenggaraan PAUD. Melalui program satu desa satu PAUD pemerintah mengaharapkan lembaga desa menjadi salah satu pendana ataupun penyelenggaran paud di desa mereka masing - masing. Program pemerintah yang mencanangkan satu desa satu paud tampaknya tidak sulit lagi untuk diterapkan hal itu di sebabkan karena adanya dana desa yang bisa dialokasikan untuk biaya operasional paud desa itu sendiri. Sehingga pencapaian tujuan dari pendidikan anak usia dini bisa dicapai dengan baik dan mutu dari lembaga paud desa itu sendiri memenuhi syarat kelayakan dari sebuah lembaga pendidikan paud. Setelah adanya Perwal kota Banda Aceh perkembangan Paud gampong lumayan berkembang dibandingkan sebelum adanya bantuan dari dana desa. Ini bisa dilihat dari hasil penelitian di Paud Sejahtera gampong Ilie Banda Aceh yang dibandingkan dengan Paud Mandiri Tk Aisiyyah Lhong Raya Banda Aceh. Walaupun ada beberapa kelengkapan alat permainan dan edukasi di Paud Sejahtera belum memenuhi standar kelayakan tapi mutu dari anak didik yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan lulusan Tk pembandingnya. Paud sejahtera bisa menjadi percontohan dalam hal pengelolaan dana gampong untuk pengembangan sumber daya manusia dalam hal pendidikan masyarakat.

Kata Kunci: Mutu PAUD, Dana Gampong, PAUD Mandiri, Kelola, Didanai

Abstract

The purpose of this study is to provide an overview of the quality of PAUD which is managed by village funds and those that are not funded by village funds in Banda Aceh. This research is descriptive qualitative research. The data collection technique is done through interviews. The research sample consisted of 2 schools, namely PAUD Sejahtera (funded by village funds) and TK Aisiyyah (not funded by village funds). Interviews conducted by researchers included: (1) village PAUD principals and independent PAUD school principals, (2) teachers, (3) village officials

*correspondence Address
E-mail: lina@bbg.ac.id

(village heads) (4) Banda Aceh City Education Office. The findings in the field indicate that all districts/cities receive funds from the APBN which are used to develop PAUD administration. Through the one village one PAUD program, the government hopes that village institutions will become one of the funders or organizers of paud in their respective villages. The government program which launched one village with one paud seems to be no longer difficult to implement because of the existence of village funds that can be allocated for the operational costs of the village paud itself. So that the achievement of the goals of early childhood education can be achieved properly and the quality of the village paud institution itself meets the eligibility requirements of a paud education institution. After the Banda Aceh city regulation, the development of village villages was quite developed compared to before the assistance of village funds. This can be seen from the results of research at Paud Sejahtera village Ilie Banda Aceh which was compared with Paud Mandiri Tk Aisyiyah Lhong Raya Banda Aceh. Although there are several types of equipment for games and education at Paud Sejahtera that have not met the eligibility standards, the quality of the students produced is not much different from those of the comparable TK graduates. Paud Sejahtera can be a model in terms of managing village funds for human resource development in terms of community education.

Keywords: PAUD Quality, Gampong Fund, Independent PAUD, Manage, Funded

PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan suatu usaha sadar serta terencana yang dilakukan kepada anak yang usianya 0-6 tahun dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu setiap tumbuh kembangnya baik jasmani maupun rohani, serta mempersiapkan kesiapan mereka untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Mengingat kembali tujuan dari suatu negara, Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah telah mencanangkan pendidikan yang akan diberikan kepada seorang anak dari mereka lahir hingga berusia usia 6 tahun. Pendidikan tersebut disebut dengan pendidikan anak usia dini.

Di zaman yang serba modern ini pendidikan seharusnya sudah ditanamkan kepada anak sejak usia sedini mungkin. Hal tersebut mengimbangi dengan semakin ketatnya persaingan global anak bangsa yang satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan generasi muda yang berkualitas, mandiri, berkepribadian yang mantap serta bertanggungjawab kepada bangsa dan negaranya seperti yang diinginkan oleh pendiri negara ini. Menurut badan UNESCO Tujuan Pendidikan adalah Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization) mencanangkan empat pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni: (1) learning to know, (2) learning to do (3) learning to be, dan (4) learning to live together. Di mana keempat pilar pendidikan tersebut menggabungkan tujuan-tujuan IQ, EQ dan SQ.

Dalam undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pada pasal 1 butir 14 pendidikan anak usia dini (PAUD) diartikan sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Maka melalui program satu desa satu PAUD pemerintah mengharapkan lembaga desa menjadi salah satu pendana ataupun penyelenggara PAUD di desa mereka masing-masing. Program pemerintah yang mencanangkan satu desa satu PAUD tampaknya tidak sulit lagi untuk diterapkan hal itu disebabkan karena adanya dana desa yang bisa dialokasikan untuk biaya operasional PAUD desa itu sendiri. Sehingga pencapaian tujuan dari pendidikan anak usia dini bisa dicapai dengan baik dan mutu dari lembaga PAUD desa itu sendiri memenuhi syarat kelayakan dari sebuah lembaga pendidikan PAUD. Mengingat pendidikan yang diberikan pada usia ini, pendidikan tersebut meletakkan suatu dasar pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Mendirikan sebuah lembaga PAUD harus mengacu kepada Standar pendirian PAUD pemerintah Indonesia yaitu: berdasarkan Permendikbud No 137 tahun 2014 tentang standar nasional PAUD (SN PAUD) di antaranya adalah:

1. Standar Nasional PAUD selanjutnya disebut standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia
2. Standar tingkat pencapaian perkembangan PAUD selanjutnya disebut STTPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, social emosional, serta seni
3. Standar isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.
4. Standar proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.
5. Standar penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil

pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian sesuai tingkat usia anak.

6. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
7. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistic dan integrative yang memanfaatkan potensi lokal.
8. Standar pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD
9. Standar pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD.

Fenomena di lapangan banyak ditemukan PAUD desa tidak berkembang dan mempunyai mutu yang sangat rendah. Padahal hampir semua desa di Kotamadya Banda Aceh telah mendapat dana bantuan desa. Masih rendahnya layanan pendidikan bagi anak usia dini pada saat ini, antara lain disebabkan oleh karena masih terbatasnya jumlah lembaga yang memberikan layanan pendidikan dini jika dibanding dengan jumlah anak pada usia 0-6 tahun yang seharusnya memperoleh layanan tersebut. Karena pendidikan anak di PAUD dan TK harus menjadi perhatian pemerintah. Lina (2019) menyatakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berada pada jalur pendidikan formal, sebagai lembaga pendidikan prasekolah, tugas utama TK adalah mempersiapkan anak dengan memperkenalkan berbagai pengetahuan, sikap/prilaku, dan keterampilan agar anak dapat melanjutkan kegiatan belajar yang sesungguhnya di sekolah dasar. Pengembangan lembaganya sangat membutuhkan dukungan dana.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota menerima dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk pengembangan penyelenggaraan PAUD. Kalau sekarang (2017) rata-rata setiap desa minimum dapat Rp 800 juta ditambah dari kabupaten dan provinsi rata-rata Rp 1,35 milyar. Untuk Aceh Besar penerimaan dana desa pada tahun 2017 dibagikan untuk 604 desa masing-masing mendapatkan Rp. 720.442.000 dan Kotamadya Banda Aceh dengan 90 desanya juga mendapatkan jumlah yang sama sebesar Rp. 720.442.000 (sumber

data dari www.djpk.depkeu.go.id) Sedangkan tahun depan dari pusat saja bisa Rp 1,6 milyar. Begitu pula kucuran dana dari provinsi di mana tidak semua kabupaten/kota memperoleh dana bantuan yang bersumber dari APBD tingkat I (provinsi), salah satu penyebab tidak dialokasikannya dana PAUD, karena dana APBD cenderung untuk pembangunan fisik. Pada umumnya dana yang berasal dari pemerintah provinsi umumnya merupakan dana dekontrasi (dekon) yang bersumber dari APBN .

Dana desa merupakan salah satu sumber dana yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga PAUD dalam memajukan kualitas mutu layanan PAUDnya. Namun ada beberapa fenomena penggunaan dana desa yang terjadi di aceh seperti beberapa hasil penelitian seperti yang ditemukan syarifah (2016) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Meuraxa telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Adapun partisipasi masyarakatnya masih rendah, dikarenakan tidak semua desa mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Kepadatan belanja dana desa telah memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan desa, dapat dilihat dari terbantunya kebutuhan desa, bertambahnya aset desa yang menyebabkan peningkatan pendapatan desa. Namun partisipasi masyarakat yang rendah menyebabkan pencapaian tujuan dari pemanfaatan dana desa tidak optimal. Implikasinya adalah dengan adanya dana desa, investasi di desa semakin bertambah sehingga telah meningkatkan pembangunan baik dalam bidang infrastruktur, ekonomi maupun sosial. Pakeh (2017) Peran Kepemimpinan Keuchik dalam Pembangunan fisik Gampong Jambak di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat. Seperti pembangunan sarana pendidikan yang masih dikatakan cukup, karena masih jauh dari kata baik dikarenakan masih kurangnya gedung sekolah, rumah dinas untuk para guru tim pengajar yang memang kebanyakan bukan penduduk asli dari warga gampong Jambak.

Fenomena lain khususnya bidang pendidikan anak adalah Jumlah dana yang minim dan biasanya digunakan untuk pembelian Alat Permainan Edukatif (APE) untuk beberapa sekolah/lembaga PAUD. Ini didukung oleh penelitian nyimas (2016) yang menyatakan pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa. Dana desa yang dikelola oleh penyelenggara desa selama ini selalu dialokasikan untuk pembangunan fisik seperti jalan desa, parit desa, dan

lainnya. Minimnya pengalokasian dana untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pendidikan masyarakat desa. Sehingga PAUD di desa sangat rendah kualitas gurunya dan fasilitas APE yang kurang memenuhi standar yang ditetapkan. Pengelola PAUD kurang mengerti dalam memberdayakan dana desa untuk kemajuan PAUD desa. Oleh sebab itu pentingnya kesadaran masyarakat pedesaan untuk bisa meningkatkan kualitas PAUD di desanya dengan pengalokasian dana desa untuk PAUD.

Berdasarkan dari data BP PAUD dan DIKMAS ACEH Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kondisi PAUD di beberapa desa di Indonesia terutama Aceh saat ini belum memenuhi standar PAUD yang ditetapkan oleh pemerintah. Di Banda Aceh kondisi PAUD desa yang mendapat bantuan dana desa mengalami kemajuan dalam berbagai hal baik dari mutu guru, anak didik, kelengkapan alat pendukung belajar dan adanya kesediaan gedung yang memadai dibandingkan dengan PAUD desa yang tidak dibantu dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan tersebut untuk bisa menjadi bahan pertimbangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian berjenis survey deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa guru, lembaga dan anak didik yang pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Metode deskriptif menggambarkan secara sistematis dan akurat atas fakta dan karakteristik mengenai bidang tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif perbandingan yaitu dengan mendeskripsikan perbandingan data yang diperoleh dari masing-masing kedua lembaga dengan melihat perbedaan dan persamaan dalam memanager lembaga yang diolah. Adapun hal-hal yang harus diikuti dalam prosedur penelitian yaitu: 1) Merumuskan masalah penelitian, 2) Menentukan tujuan survei, 3) Menentukan konsep hipotesa berdasarkan buku perpustakaan, 4) Membuat kuesioner dan mempersiapkan instrumen wawancara, 5) Menyebarkan kuesioner ke lapangan dan mewawancarai objek, 6) Pengolahan data, 7) Analisa dan laporan

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di satu PAUD yang didanai oleh desa dan PAUD yang mandiri di wilayah Kota Banda Aceh. Paud sejahtera adalah Paud yang direkomendasikan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan kota banda aceh sebagai Paud percontohan dalam pengelolaan dana desa yang dialokasikan

pada Paud gampong. Sedangkan alasan alasan memilih Tk Aisiyiyah karena Tk tersebut sudah lama berdiri dan manajemen pengelolaannya sangat bagus. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti antara lain kepada: (1) kepala sekolah PAUD desa dan kepala sekolah PAUD mandiri, (2) guru, (3) perangkat desa (kepala desa) (4) Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Indikator wawancara yang digunakan 1) Kebutuhan dana untuk operasional sekolah 2) Mendeteksi permasalahan kesejahteraan guru, 3) Pelaporan dalam menggunakan dana yang terkait dengan pengembangan program pendidikan, 4) APE sekolah, 5) Mutu murid yang dihasilkan dari PAUD tersebut. Sewaktu pelaksanaan wawancara pengambilan dokumentasi foto juga bisa dilaksanakan.

Wawancara dengan responden dilakukan dengan bertatap muka ataupun melalui percakapan telepon. Setelah data semua terkumpul, mengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responden menyajikan data tiap variable yang diteliti melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Statistic deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dan dokumentasi foto untuk melengkapi data yang dibutuhkan seperti foto gedung sekolah, APE indoor dan outdoor serta gedung sekolah. Menurut Moleong (2013: 324) ada empat kriteria yang digunakan, yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*conformability*).

Dari keempat kriteria tersebut peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data dengan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), dan kepastian (*conformability*), Kepercayaan (*Credibility*) kepercayaan diperlukan untuk mengukur dan mendapatkan kepercayaan dari hasil temuan penelitian, sehingga dapat dipercaya dan diterima oleh pihak yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

PAUD merupakan lembaga yang menjadi dasar peletakan modal dasar dalam kehidupan anak dalam seluruh aspek perkembangan anak. Lina (2020:53) menyatakan PAUD memberi kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kepribadian dan potensi secara maksimal. Atas dasar ini, lembaga PAUD perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti

kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik dan motorik. PAUD yang baik harus mempunyai manajemen pendidikan yang memadai. Manajemen pendidikan mengandung dua pokok pemikiran, yaitu manajemen dan pendidikan. Berdasarkan asas legal pengertian pendidikan dapat dilihat pada keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dalam GBHN tahun 1988 pendidikan diartikan sebagai proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Manajemen Penyelenggaraan PAUD Dengan demikian tanggungjawab pendidikan ada pada pundak keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pendirian satuan PAUD dapat didirikan oleh pemerintah desa, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum. Satuan PAUD terdiri dari TK, TKLB, KB, TPA, dan SPS. Adapun mekanisme pendirian PAUD terdiri dari 2 langkah tercantum dalam Permendikbud no 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan PAUD pertama pendirian satuan PAUD mengajukan permohonan ijin pendirian kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan atau kepala satuan kerja perangkat daerah. selanjutnya kepala dinas pendidikan atau pejabat yang ditunjuk wajib menelaah permohonan pendirian satuan PAUD tersebut berdasarkan kelengkapan persyaratan tersebut.

PAUD harus memiliki sumber pembiayaan kegiatan, sumber dananya bisa berasal dari dana perorangan atau modal awal pendiri, dana dari orang tua murid, kelompok, maupun dana masyarakat seperti dana desa. Bisa juga sumber dana diperoleh dari proposal-proposal yang diajukan kepada pemerintah daerah setempat. Pengertian dana desa Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dana yang termasuk di dalamnya adalah biaya investasi dan operasional yang mengacu pada pengaturan tentang sumber pemasukan dana pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola, harus disusun dalam bentuk laporan keuangan yang bisa dimengerti dan dipertanggungjawabkan. Peraturan tentang alokasi dana desa yang diterbitkan oleh menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan

transmigrasi RI no 4 tahun 2017. Penetapan tentang prioritas penggunaan dana desa bunyinya antara lain:

1. Prioritas pembangunan dana desa untuk membiayai bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. Prioritas dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

Pengelolaan dana desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Di Kota Banda Aceh telah dikeluarkannya peraturan walikota tahun 2018 tentang pengalokasian dana desa, seperti pada Bab IV tentang penggunaan dana desa Pasal 11 yang berbunyi, *Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Gampong yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Gampong, yang meliputi antara lain: a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1. lingkungan pemukiman; 2. transportasi; 3. energi; dan 4. informasi dan komunikasi. b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1. kesehatan masyarakat; dan 2. pendidikan dan kebudayaan.*

Dan Bab IV tentang penggunaan dana desa pada Pasal 13 ayat 2e *dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan social dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Gampong penyandang disabilitas.*

Berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh maka perangkat desa dan masyarakat Kota Banda Aceh mempunyai pijakan yang kuat dalam pengaturan dana desa salah satunya bisa dialokasikan untuk pendidikan, sesuai dengan permendikbud nomor 18 tahun 2018

yang menyatakan Dana penyediaan layanan PAUD bersumber dari:

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Pemerintah Desa;
4. Masyarakat;
5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Melihat pentingnya pengalokasian dana desa untuk menunjang sarana dan prasarana anak usia dini di desa maka penulis tertarik membahas permasalahan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta hasil wawancara dengan Kepala PAUD Sejahtera dan TK Aisiyyah di kota Banda Aceh, menyatakan bahwa sudah berusaha melakukan manajemen kurikulum dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik. Orang tua peserta didik dapat memilih pelayanan apa yang mereka inginkan. Sebagai contoh, Taman Kanak-kanak (TK) yang mana waktu pembelajarannya dimulai dari pukul 08.00 s.d 11.30 WIB. Kepala PAUD Sejahtera dan PAUD Aisiyyah menyatakan bahwa bentuk layanan pendidikan pada peserta didik yang diselenggarakan pada PAUD Sejahtera dan PAUD Aisiyyah adalah Layanan Taman Kanak-Kanak (TK), Layanan pendidikan yang diberikan berdasarkan tingkatan umur. Yaitu untuk umur 4 s.d 6 tahun dikelompokkan pada pendidikan Taman Kanak- Kanak (TK) Dalam melaksanakan layanan pendidikan pada peserta didik yang diselenggarakan PAUD Sejahtera dan PAUD Aisiyyah adalah Layanan Taman Kanak-Kanak (TK) menyatakan tidak terlampau banyak mengalami kendala, hanya kendala-kendala kecil yang tentunya bisa diatasi secara bersama-sama. Dalam hal ini, guru juga harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat ketika anak didik belum dapat membentuk kompetensi dasar, apakah kegiatan pembelajaran di hentikan, diubah metodenya, atau mengulang dulu pembelajaran yang lalu. Guru harus menguasai prinsip-prinsip pembelajaran, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, pemilihan dan penggunaan metode, keterampilan, menilai hasil belajar, serta memilih dan menggunakan strategi atau pendekatan pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar di PAUD Sejahtera sangat terbantu dengan bantuan Dana Gampong, BOP dan infak wali murid. Sedangkan pada TK Aisiyyah sumber dana di peroleh dari dana yayasan dan BOP. Yang mana kedua lembaga tersebut tetap merasakan keterbatasan dalam hal-hal pengembangan di gedung sekolah, diakibatkan mahalnnya lahan di perkotaan.

Tabel 1. Perbandingan Manajemen Kurikulum

No	Aspek	PAUD	TK Aisiyyah	Kesimpulan
1.	PAUD Gampong / Mandiri	Didirikan oleh gampong	Didirikan oleh yayasan	
2.	Program Tahunan	Membuat di awal tahun	Membuat di awal tahun	Sama-sama dibuat di awal tahun
3.	Mekanisme Penyusunan	Disusun bersama Kepala Sekolah dan Guru	Disusun bersama Kepala Sekolah dan Guru	Sama-sama disusun bersama Kepala Sekolah dan Guru
4.	Membuat RKH dan RKM	Semua guru	Semua guru	Semua guru membuat RKH dan RKM
5.	Membuat Media Pembelajaran	Guru	Guru	Semua guru membuat Media Pembelajaran
6.	Pedoman pembuatan	Kurikulum 2013	Kurikulum 2013	Sama dalam hal kurikulum.

Tabel 2. Perbandingan Mutu Murid

No	Aspek	PAUD	TK Aisiyyah	Kesimpulan
1.	Siswa Baru	Penerimaan sesuai kapasitas ruangan	Penerimaan sesuai kapasitas ruangan	Sama dalam penerimaan siswa baru
2.	Jumlah siswa	25	135	Berbeda dalam jumlah
3.	Penilaian sesuai dengan perkembangan	Melaksanakan evaluasi	Melaksanakan evaluasi	Sama dalam melakukan evaluasi
4.	Doa harian	Sudah mampu	Sudah mampu	Sama-sama sudah mampu
5.	Kemampuan mengenal huruf	Sudah mampu	Sudah mampu	Sama-sama sudah mampu

6.	Kemampuan mengenal angka	Sudah mampu	Sudah mampu	Sama-sama sudah mampu
7.	Kemampuan mengenal huruf hijaiyah	Masih kurang	Sudah bagus	Perbedaan akibat kurangnya tenaga pengajar
8.	Hafalan 3 surat pendek	Sudah mampu	Sudah mampu	Sama-sama sudah mampu
9.	Kemampuan adaptasi dengan lingkungan	bagus	bagus	Sama-sama sudah bagus
10.	Kemandirian anak	Sudah mandiri	Sudah mandiri	Sama-sama sudah mandiri

Tabel 3. Perbandingan Mutu Tenaga Pendidik

No	Aspek	PAUD Sejahtera	TK Aisiyyah	Kesimpulan
1.	Kualifikasi	Rata-rata lulusan SMA	Sudah S1 semua	Masih kurangnya tenaga pengajar yang memenuhi standar
2.	Jumlah tenaga pendidik	5 orang termasuk kepala sekolah	11 orang termasuk kepala sekolah	Dari jumlah murid sudah memadai
3.	Pengawasan oleh	Dinas dan geuchik gampong	Dinas dan yayasan	Mempunyai pengawas
4.	Penampilan / seragam	Pribadi	IGTKI dan yayasan	PAUD sejahtera masih kurang
5.	Seminar / pelatihan	Ada	Ada	Sama-sama mengikuti pelatihan
6.	Gaji	Rata-rata Rp. 600.000	Rata-rata Rp. 1.000.000.	Kesejahteraan guru di TK Aisiyyah lebih baik.

Tabel 4. Perbandingan pembiayaan yang dialokasikan pada PAUD

No	Aspek	PAUD Sejahtera	TK Aisiyyah	Kesimpulan
1.	Modal awal	Bantuan LSM	Yayasan	Besarnya berbeda
2.	BOP	Dapat	Dapat	BOP tergantung jumlah murid
3.	SPP / Infaq	Kecil	Besar	PAUD desa sangat kecil
4.	Dana desa	dapat	Tidak	Jumlahnya sesuai dengan Perwal kota
5.	Gaji guru	Dana desa + Infaq	Yayasan + SPP	Berbeda kisaran jumlahnya
6.	Pertanggungjawaban	Kepala sekolah	Kepala sekolah	Sama-sama dibuat oleh kepala sekolah
7.	Penerimaan	Dibuat laporan	Dibuat laporan	Bendahara
8.	Pelaporan	Geuchik gampong	Yayasan	Sesuai LPDK /LPDD bagi dana desa.

Tabel 5. Perbandingan Gedung dan APE

No	Aspek	PAUD Sejahtera	TK Aisiyyah	Kesimpulan
1.	Di luar kelas / Outdoor	Memadai sesuai jumlah murid	Lengkap dan memadai	TK Aisiyyah APE nya lebih memadai, bangunannya juga lebih bagus dibandingkan PAUD Sejahtera.
2.	Di dalam Kelas / Indoor	Kurang memadai	Memadai sesuai jumlah murid	
3.	Bak pasir	Tidak ada	Tidak ada	
4.	Ruang kelas	2 ruang kelas	5 ruang kelas	

5.	Gedung sekolah	Terlalu sempit dan menyatu dengan Polindes	Lumayan Besar dan milik yayasan
6.	Perawatan Gedung dan APE	Kurang	Bagus

Walaupun banyak terdapat persamaan-persamaan dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, dan tata laksana kelas sesuai dengan kurikulum. Adapun perbedaan seperti hal berikut:

1. Manajemen kurikulum PAUD sudah dilaksanakan oleh PAUD Sejahtera dan TK Aisyiyah, dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan anak usia dini yaitu layanan yang disediakan berupa kelompok Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB). Kelompok-kelompok layanan tersebut diatur dengan sangat baik oleh kepala PAUD dan TK, sehingga peserta didik merasa senang dapat bersekolah di PAUD Sejahtera dan TK Aisyiyah. Walaupun tingkat tenaga pendidikan di PAUD Sejahtera masih sangat kurang tetapi dengan kerjasama yang baik sesama guru penyediaan layanan tersebut sudah memenuhi standar pelayanan peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Dalam hal ini TK Aisyiyah memiliki cukup tenaga berpendidikan S1 PAUD dan kesejahteraan lebih baik dibandingkan dengan PAUD Sejahtera.
2. Manajemen kesiswaan yang dilakukan pada PAUD Sejahtera dan TK Aisyiyah sudah dilakukan dalam pembelajaran untuk pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan anak, kepala sudah merencanakan dengan sangat baik, pembelajaran yang dilakukan yang sesuai dengan kelompok umur peserta didik, dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar serta peserta didik itu sendiri. PAUD Sejahtera dan TK Aisyiyah sama-sama menerapkan system belajar sambil bermain.
3. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD Sejahtera dan TK Aisyiyah sudah dilakukan dengan cukup baik. Walaupun Pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan masih kurang memenuhi standar, dengan cara memberi kesempatan pendidik untuk kuliah dan mengikuti diklat, maka kualitas tenaga pendidik di kedua sekolah tersebut sedikit meningkat, pihak kepala, mengatur sedemikian rupa supaya tenaga pendidik yang ada dapat terakomodasi dengan baik.

4. Manajemen sarana dan prasarana sudah dilakukan oleh kepala PAUD Sejahtera dan TK Aisyiyah. Pada TK Aisyiyah pemeliharaan gedung dan APE ditangani oleh yayasan sehingga sarana dan prasarana yang ada sekarang sudah lebih dan cukup, baik itu dan segi kuantitas maupun kualitas yang disyaratkan sesuai aturan yang ada. Selain itu prinsip sarana dan prasarana tentang alat yang aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak, sesuai dengan tingkat perkembangan anak, memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada sudah terpenuhi. Pada PAUD Sejahtera sarana dan prasarananya masih dirasakan sangat minim. Dikarenakan kurangnya dana. Besaran dana yang diterima dari dana gampong sebesar 30 juta per tahun masih sangat kurang sehingga, perawatan gedung dan APE sangat kurang.
5. Manajemen keuangan sudah dilakukan oleh pihak PAUD Sejahtera dan TK Aisyiyah sudah sesuai dengan petunjuk dan aturan tentang keuangan penyelenggaraan PAUD. Pengelolaan keuangan PAUD Sejahtera dan TK Aisyiyah, secara rutin membuat pelaporan keuangan sesuai dengan juknis BOP dan aturan yang ada, hal ini juga sudah dikomunikasikan dengan orang tua. Pengelolaan keuangan yang transparan berimplikasi kepada semakin banyaknya minat orang tua untuk menjadikan anak mereka sebagai peserta didik pada PAUD Sejahtera dan TK Aisyiyah. Orang tua dan masyarakat akan merasa senang dan bangga dengan dijadikannya anak mereka sebagai peserta didik pada PAUD tersebut. Dengan banyaknya peserta didik juga akan berdampak kepada kesejahteraan guru-guru PAUD Sejahtera dan TK Aisyiyah di Kota Banda Aceh.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pengolahan data dapat diambil kesimpulan bahwa PAUD desa sangat kekurangan dana dalam operasionalnya sehingga menunjukkan bahwa perbandingan mutu antara PAUD Sejahtera dengan TK Aisyiyah di Kota Banda Aceh, sangat jauh berbeda. PAUD Sejahtera walaupun sudah menjadi PAUD Percontohan dalam hal pengelolaan dana Gampong yang dialokasikan untuk PAUD Gampong baik di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Tetap masih banyak kekurangan dalam berbagai hal seperti gedung dan APE yang kurang memadai. Ini juga disebabkan karena PAUD tersebut berada di perkotaan, sehingga untuk penambahan kelas dan ruang bermain dibutuhkan dana yang sangat besar. Bila

dilihat dari perbandingan hasil anak didik yang diluluskan tidaklah terlalu berbeda dalam kemajuan perkembangannya. Dan dari segi kesejahteraan guru juga sudah lumayan baik, jika dilihat dari gaji dan penampilan guru di sekolah.

Saran

Dengan adanya manajemen yang dilakukan pada satuan pendidikan setingkat PAUD/TK, maka tujuan dari PAUD upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, dapat tercapai dengan optimal. Untuk itu peneliti menyarankan beberapa hal antara lain:

1. Kepala PAUD juga harus pandai dan giat dalam mengelola proses pendidikan yang dilakukan pada PAUD tersebut agar dapat tercapai secara optimal. Dan terus membuka hubungan baik dengan berbagai pihak seperti Dinas Pendidikan, Instansi terkait maupun pihak Universitas/STKIP untuk peningkatan mutu guru.
2. Pengelola PAUD gampong diharapkan bisa bekerja sama dengan berbagai pihak yang bisa mendukung program pendidikan di sekolah seperti pihak-pihak swasta, penerbit buku, puskesmas, produk unggulan untuk peningkatan gizi anak.
3. Adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan agar tidak terjadi salah paham dan penolakan terhadap manajemen yang dilakukan. Dana Gampong diharapkan bisa lebih besar lagi dialokasikan untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa, terutama di bidang Pendidikan.
4. Pengelolaan yang dilakukan juga harus mempunyai dasar, yaitu standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aduwina, Pake. (2017). Peran Kepemimpinan Keuchik Dalam Pembangunan Di Gampong Jambak, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*. 3(1), 103-113. Retrieved from <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/758/613>. Diakses 2 agustus 2020.
- Amelia, Lina. Lindawati (2019). Peningkatan Kemampuan Berbicara Anak Dengan Penggunaan Gambar Berseri Pada Kelompok B Di Paud Tgk. M. Syarief Aceh Besar. *Jurnal Buah Hati*. 6(1), 38-45. Retrieved from <https://ejournal.bbg.ac.id/buahhati/article/view/930>.
- Amelia, Lina. Millata Zamana, & Sri Ramadani. (2020). Efektivitas Permainan Wayang Huruf Hijaiyah Dalam Meningkatkan Kemampuan Mengenal Huruf Hijaiyah Pada Kelompok A Di Tk Ikal Dolog Banda Aceh. *Jurnal Buah Hati*, 7(1), 52-64. Retrieved from <https://ejournal.bbg.ac.id/buahhati/article/view/939>.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nyimas Latifah Letty Aziz (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*. 13(2), 193-211. Retrieved from <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/575/511>. Diakses 2 agustus 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan walikota banda aceh no 73 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
- PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Syarifah Vandiratika Harning, Amri Amri (2016). Dana Desa Dan Kepadatan Belanja Di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*.1(1) 254-261 Retrieved from <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/699/790> . Diakses 2 agustus 2020.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.